



LAPORAN KINERJA

*Sekretariat Direktorat Jenderal
KSDCAE*

2018

DAFTAR ISTILAH

A_____

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ASN : Aparatur Sipil Negara

B_____

BBKSDA : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

BKSDA : Balai Konservasi Sumber Daya Alam

I_____

IKK : Indikator Kinerja Kegiatan

IKU : Indikator Kinerja Utama

K_____

KLHK : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KSDAE : Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

KSP : Kantor Staf Presiden

L_____

LH : Lingkungan Hidup

LKj : Laporan Kinerja

M_____

METT : *Management Effectiveness Tracking Tool*

P_____

PANRB : Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PK : Perjanjian Kinerja

PN : Prioritas Nasional

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

S_____

SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SBSN : Surat Berharga Syariah Negara

SDA : Sumber Daya Alam

SDH : Sumber Daya Hutan

SDM : Sumber Daya Manusia

Setditjen : Sekretariat Direktorat Jenderal

R_____

Renja : Rencana Kerja

Renstra : Rencana Strategis

Renaksi : Rencana Aksi

RKT : Rencana Kinerja Tahunan

RINGKASAN / IKHTISAR CAPAIAN KINERJA

Sesuai yang diamanatkan dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019, bahwa visi pembangunan nasional 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Selanjutnya misi pembangunan nasional adalah:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang KSDAE adalah **“Mendukung Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Mutu Kehidupan Manusia”**. Dimana sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE yang ingin diwujudkan yaitu:

1. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
2. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan program **Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem**, melalui delapan kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi;
3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik;
4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi;
5. Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial;
6. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;
7. Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta
8. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE.

Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dalam melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem diukur dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin pada tahun 2019. Pencapaian nilai SAKIP tersebut mendukung sasaran kegiatan yaitu terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Target kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018 dan Perjanjian Kinerja yang dibuat antara Sekretariat Direktorat Jenderal dengan Direktur Jenderal KSDAE yaitu nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 77.75 poin.

Evaluasi atas implementasi SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Evaluasi implementasi SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.1/Itjen-Setitjen/2015 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP lingkup Kementerian LHK. Hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Ditjen KSDAE dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari nol sampai dengan 100. Eselon I Direktorat Jenderal KSDAE memperoleh nilai sebesar 78,03 dengan kategori BB (>70-80). Rincian penilaian hasil evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE atas lima komponen besar manajemen kerja sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja (30%), dengan nilai capaian 91,51% dan skor 27,45;
- b. Pengukuran Kinerja (25%), dengan nilai capaian 91,01% dan skor 22,75;
- c. Pelaporan Kinerja (15%), dengan nilai capaian 87,67% dan skor 13,15;
- d. Evaluasi Internal (10%), dengan nilai capaian 56,80% dan skor 5,68;
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%), dengan nilai capaian 45,00% dan skor 9,00.

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 sebesar Rp. 79.657.029.000 yang terbagi dalam 3 *output*. Realisasi anggaran sebesar sebesar Rp. 70.876.985.269 atau sebesar 88,98 %. Berdasarkan *output* yang dilaksanakan tersebut, persentase realisasi anggaran paling tinggi yaitu pada *output* nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 93,08%, diikuti *output* layanan perkantoran sebesar 90,74% dan layanan internal (*overhead*) sebesar 50,85%.

Berdasarkan capaian kinerja kegiatan dan realisasi anggaran tersebut, kemudian dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan persentase capaian kinerja dengan realisasi anggaran. Dari hasil capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 100,36 % dan realisasi anggaran sebesar 88,98%,

diperoleh rasio efisiensi sebesar 1,13. Angka tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE efisien terhadap capaian kinerja.

Kendala yang dihadapi dalam evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE yaitu: IKP pada Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2018 belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang SMART, pemantauan kinerja masih dilakukan pertahun, pemantauan capaian renaksi belum dilakukan secara triwulan dan semester serta belum dilakukannya evaluasi program, masih tercapai target IKP yang tidak tercapai. Kendala dalam penyerapan anggaran, antara lain masih adanya kelebihan alokasi belanja pegawai dan terdapat beberapa kegiatan pengadaan yang tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan pengadaan tersebut merupakan revisi beberapa kegiatan pada beberapa UPT yang tidak dapat merealisasikan anggaran dikarenakan adanya bencana alam.

Langkah-langkah untuk menghadapi kendala dalam evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE antara lain pemantauan kinerja dilakukan secara berkala mulai dari bulanan, triwulan, semester dan tahunan, melaksanakan evaluasi program sehingga target IKP di tahun berikutnya dapat tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan kinerja. Untuk mengantisipasi realisasi anggaran yang rendah, beberapa upaya yang harus dilakukan, antara lain: melakukan penghitungan kebutuhan belanja pegawai sesuai kebutuhan termasuk memperhitungkan perekrutan pegawai dan pensiun, melakukan revisi anggaran untuk mengoptimalkan sisa anggaran dan kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan tidak dapat dilaksanakan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Kami memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyelesaikan program kerja tahun anggaran 2018 sebagaimana diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018. Laporan Kinerja (LKj) tahun 2018 merupakan perwujudan

Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal dengan Direktur Jenderal KSDAE yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.2/KSDAE/SET/ REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Tahun 2018 ini merupakan salah satu bukti visual pelaksanaan program kerja selama tahun 2018 yang mencakup Perjanjian Kinerja antara Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dengan Direktur Jenderal KSDAE Tahun 2018 yang meliputi Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan staf Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem dan berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon masukan supaya ke depan kami bisa lebih baik.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb



Jakarta, Desember 2018

Ir. Herry Subagiadi, M.Sc.
NIP. 19641115 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I <u>PENDAHULUAN</u>	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya Manusia.....	3
E. Isu Strategis	4
BAB II <u>PERENCANAAN KINERJA</u>	5
A. Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019.....	5
B. Rencana Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	6
C. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018.	8
BAB III <u>AKUNTABILITAS KINERJA 2018</u>	9
A. Capaian Kinerja	9
B. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional dan Proyek SBSN	17
C. Capaian Aksi Tematik	20
BAB IV	22
PENUTUP	22
LAMPIRAN	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE Tahun 2018	8
Tabel 2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018	9
Tabel 3. Realisasi Berdasarkan Output Kegiatan	15
Tabel 4. Komponen kegiatan Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	15
Tabel 5. Kendala dan Permasalahan komponen Nilai Sakip Ditjen KSDAE	15
Tabel 6. Target prioritas Nasional Ditjen KSDAE Tahun 2018	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	2
Gambar 2. Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2018	3
Gambar 3. Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE	6
Gambar 4. Penjabaran Renja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2018	7
Gambar 5. Infografis hasil penilaian SAKIP 5 komponen tahun 2018	10
Gambar 6. Kelemahan hasil evaluasi SAKIP	11
Gambar 7. Rekomendasi / tindak lanjut evaluasi SAKIP	11
Gambar 8. Capaian NILAI SAKIP 2015-2018	12
Gambar 9. Pagu anggaran Setditjen KSDAE per sumber dana dan Jenis belanja	13
Gambar 10. Realisasi Setditjen KSDAE 2018	14
Gambar 11. Capaian Prioritas Nasional Ditjen KSDAE Tahun 2018	18
Gambar 12. Program Prioritas Nasional	19
Gambar 13. infografis proyek SBSN	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau tingkat capaian atas pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasarannya yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui para pihak, sehingga dapat dinilai dan dievaluasi untuk penyempurnaannya. Kewajiban penyusunan laporan kinerja ini tertuang dalam peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE.

Komitmen kinerja yang harus dicapai Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2018. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE memiliki target untuk mencapai Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 77,75 pada tahun 2018.

Sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja tahun 2018, laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2018. Pencapaian Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 melalui 1) penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; 2) penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 3) evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan 4) evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban oleh Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE menjadi pendukung kebijakan yang sangat penting artinya bagi pembangunan kehutanan secara menyeluruh, khususnya di bidang KSDAE. Dengan penyusunan laporan kinerja, pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasarannya dapat dinilai dan dievaluasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun berikutnya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKj Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE kepada Direktur Jenderal KSDAE atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah diperjanjikan. Sedangkan tujuan penyusunan

LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 77,75 pada tahun 2018.

C. Struktur Organisasi

Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE diarahkan untuk memenuhi tugas koordinasi dan memberikan dukungan administrasi serta fungsi koordinasi dan pelaksanaan penyusunan program dan evaluasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama teknis dan bantuan advokasi hukum serta pelaksanaan urusan keuangan dan umum di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE yang didasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk memenuhi tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE memiliki 4 Bagian dan masing-masing bagian terdiri dari 3 Subbagian.

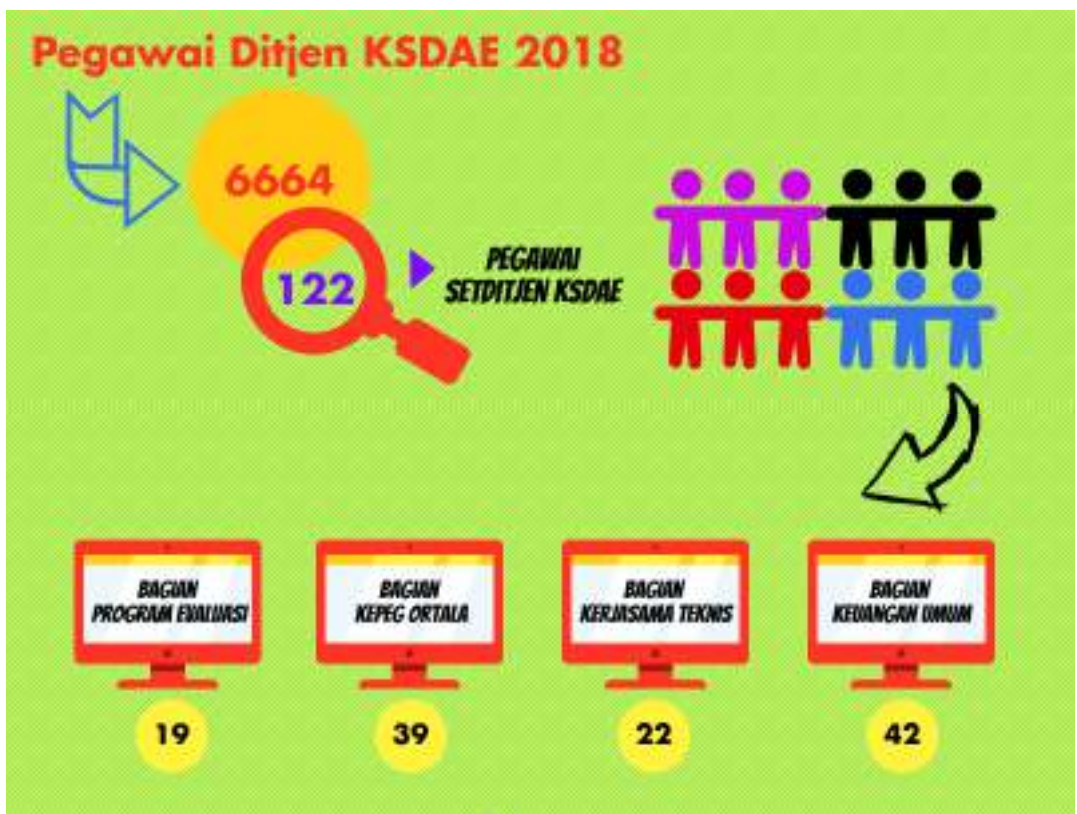


Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

D. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2018 didukung oleh total pegawai sebanyak 122 orang tenaga ASN dan 42 orang tenaga kontrak. Sebaran pegawai terdapat di Bagian Program dan Evaluasi sebanyak 19 pegawai, Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis sebanyak 22 pegawai, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana sebanyak 39 pegawai dan Bagian Keuangan dan Umum sebanyak 42 pegawai.

Sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan administrasi kepegawaian sebanyak 6.664 pegawai termasuk 122 pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal.



Gambar 2. Pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2018

E. Isu Strategis

Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas koordinasi dan memberikan dukungan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Tolak ukur dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah meningkatnya nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 78 poin pada tahun 2019. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan SAKIP tahun 2018, Direktorat Jenderal KSDAE memperoleh nilai 78,03. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target poin 78 pada tahun 2019 dapat dicapai lebih cepat. Namun demikian, berdasarkan analisis terhadap hasil penilaian SAKIP tahun 2018 dimaksud, kondisi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE menghadapi tantangan untuk melakukan perbaikan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya adalah pemantauan pencapaian target kegiatan sesuai rencana aksi belum dilakukan secara periodik, dan pencapaian target masih diukur di level *output* belum sampai pada capaian *outcome*. Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan penerapan SAKIP adalah kelemahan dalam pencapaian kinerja organisasi yaitu target IKP yang tidak terpenuhi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diturunkan pada sasaran program di setiap Eselon I. Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sasaran program tersebut diturunkan pada masing-masing sasaran kegiatan di Eselon II. Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE adalah Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Untuk mengukur pencapaian kinerja, telah ditetapkan indikator kinerja kegiatannya yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin pada tahun 2019.

RENSTRA SETDITJEN KSDAE





Gambar 3. Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

B. Rencana Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

Perencanaan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Nomor P.254/SET/PROEV/REN.2/11/2017 tentang Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018 (matrik Renja sebagaimana dalam lampiran 1). Sedangkan penentuan kinerja tahunan telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 antara Sekretariat Direktorat Jenderal dengan Direktur Jenderal KSDAE. Kinerja sasaran strategis, Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE diukur melalui indikator kinerja kegiatan, Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 77,75 poin pada tahun 2018.



Gambar 4. Penjabaran Renja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2018

C. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2018.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan adanya Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE tahun 2018 hanya terdapat satu sasaran strategis dan satu indikator kegiatan, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen KSDAE Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian Prioritas Nasional	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin	77,75

Pernyataan PK yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal KSDAE dan Sekretaris Ditjen KSDAE selengkapnya disampaikan dalam Lampiran 2.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 2018

A. Capaian Kinerja

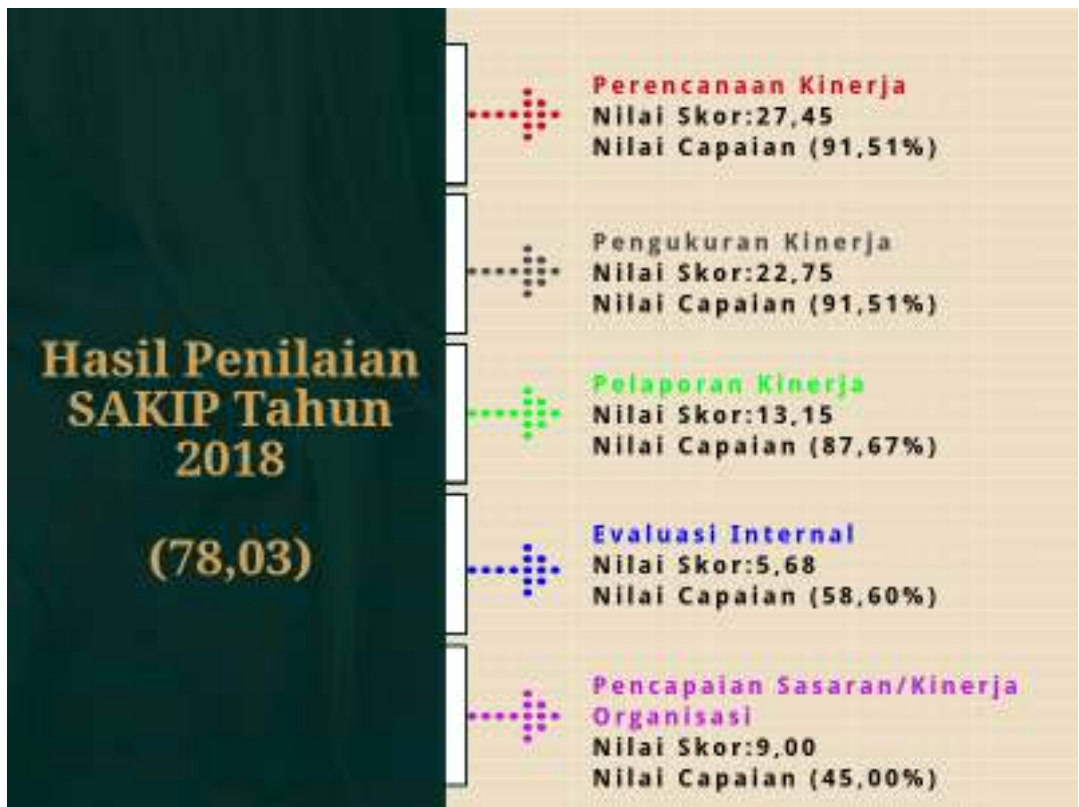
1. Realisasi Capaian Kinerja

Pada tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE dengan sasaran kegiatan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 yaitu Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dengan target sebesar 77,75 poin.

Pengukuran nilai SAKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal KLHK Nomor P.1/Itjen-Setitjen/2015 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi SAKIP lingkup Kementerian LHK. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE dihasilkan dari kegiatan evaluasi atas penerapan SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK setiap tahunnya. Pengukuran capaian kinerja sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE dilakukan dengan membandingkan target sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Hasil pengukuran tersebut disajikan pada tabel berikut.

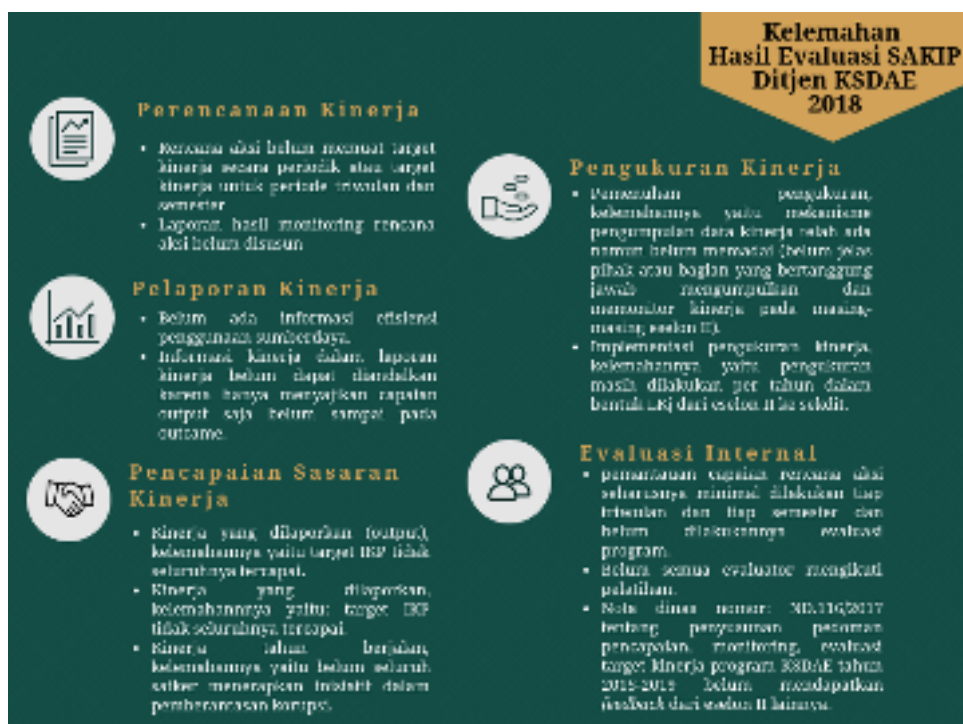
Tabel 2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin	77,75	78,03	100,36

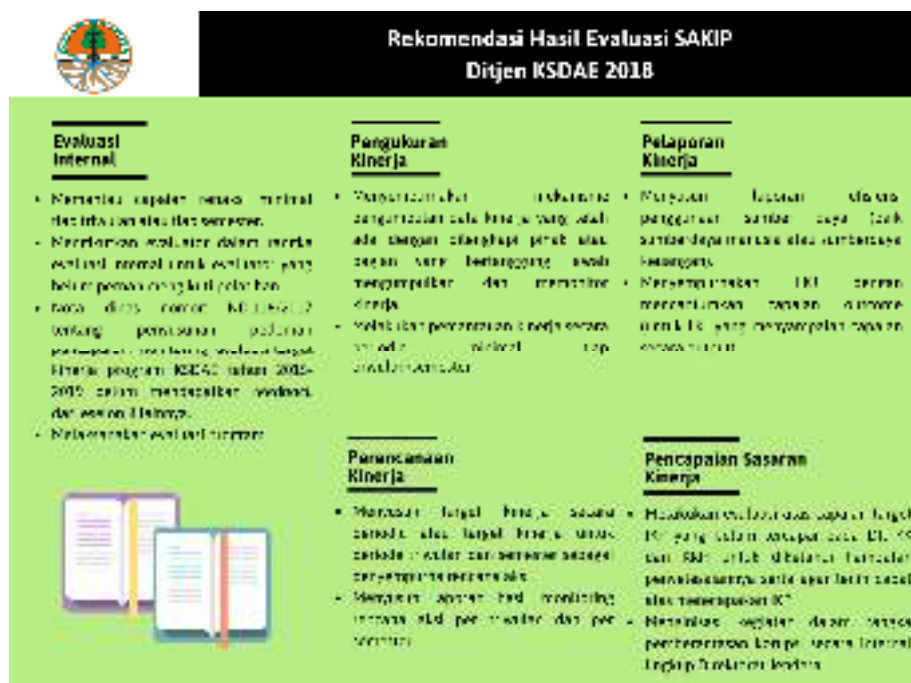


Gambar 5. Infografis hasil penilaian SAKIP 5 komponen tahun 2018

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KLHK tahun 2018 bahwa nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE yang merupakan akumulasi dari nilai evaluasi manajemen kinerja pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 78,03 poin. Pencapaian nilai SAKIP tahun 2018 sebesar 78,03 poin telah melebihi target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 77,75 poin.



Gambar 6. Kelemahan hasil evaluasi SAKIP



Gambar 7. Rekomendasi / tindak lanjut evaluasi SAKIP

Pencapaian nilai Direktorat Jenderal KSDAE juga lebih cepat dari target pencapaian nilai SAKIP jangka menengah (Renstra) yaitu sebesar 78,00 poin pada tahun 2019. Nilai SAKIP tahun 2018 sebesar 78,03 poin, meningkat sebesar 7,77 poin dibandingkan tahun 2017. Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun 2015 dan 2016, nilai SAKIP tahun 2018 mengalami penurunan. Namun demikian, terdapat beberapa komponen yang terus naik selama 4 tahun terakhir yaitu komponen perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja sedangkan komponen evaluasi internal dan pencapaian kinerja terus mengalami penurunan.



Gambar 8. Capaian NILAI SAKIP 2015-2018

Peningkatan nilai pada komponen perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja yaitu:

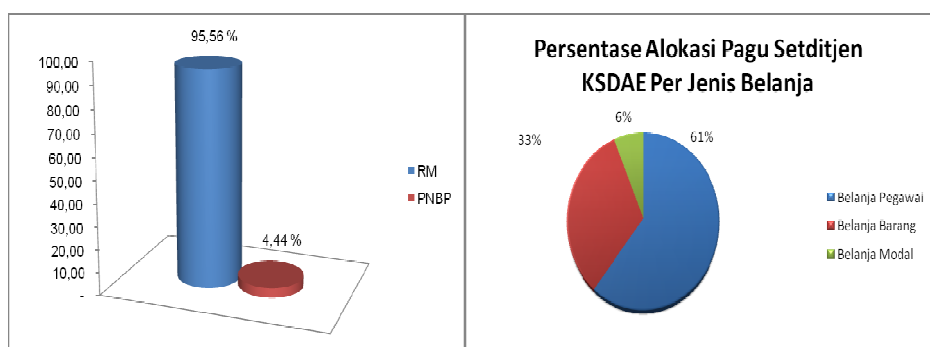
- Faktor perencanaan strategis yang baik terdiri dari pemenuhan rencana strategis, kualitas rencana strategis, dan implementasi rencana strategis.
- Faktor perencanaan kinerja tahunan yang baik terdiri dari pemenuhan perencanaan kinerja tahunan, kualitas perencanaan kinerja tahunan, dan implementasi perencanaan kinerja tahunan.
- Faktor pemenuhan pengukuran kinerja
- Faktor kualitas pengukuran kinerja
- Faktor pemenuhan pelaporan yang baik
- Faktor pemanfaatan informasi kerja
- Faktor kinerja output yang dilaporkan

Penurunan nilai pada komponen evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja disebabkan karena masih adanya kelemahan yaitu:

- IKP pada Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2018 belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang SMART serta target kinerja belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik.
- Pemantauan pengukuran kinerja masih dilakukan pertahun dalam bentuk LKj dari eselon II lainnya ke Sekdit.
- Belum ada informasi efisiensi penggunaan sumberdaya serta informasi kinerja belum dapat diandalkan karena baru menyajikan capaian output dan belum outcome.
- Pemantauan capaian renaksi belum dilakukan secara triwulan dan semester serta belum dilakukannya evaluasi program.
- Belum semua petugas evaluator mengikuti pelatihan dan belum adanya feedback dari eselon II lainnya terhadap pemantauan, monitoring dan evaluasi kinerja.
- Masih tercapai target IKP yang tidak tercapai, di Direktorat Kawasan Konservasi (METT, luas kawasan yang terdegradasi), Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (sertifikasi penangkar, ketersediaan data, pusat pengembangbiakan dan suaka satwa).
- Belum seluruh satker menerapkan inisiatif dalam pemberantasan korupsi.

2. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018, berdasarkan sumber dana terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar 95,56% dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 4,44%. Sedangkan berdasarkan jenis belanja terdiri dari belanja pegawai (51) sebesar 60,81%, belanja barang sebesar 32,79% dan belanja modal sebesar 6,40%.



Sumber: Monev.anggaran.kemenkeu.go.id (31 Des 2018)

Gambar 9. Pagu anggaran Setditjen KSDAE per sumber dana dan Jenis belanja

Pagu Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE tersebut, terbagi dalam 3 output kegiatan. Alokasi terbesar pada output Layanan Perkantoran sebesar 67,14% untuk pembayaran gaji dan tunjangan, keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi pelaksanaan operasional kantor,

diikuti berturut-turut output nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 26,86% dan output Layanan Internal (overhead) sebesar 5,99%.

Sampai dengan akhir tahun 2018, realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebesar **Rp.70.876.985.269,-** atau sebesar **88,98%**.



Gambar 10. Realisasi Setditjen KSDAE 2018

Berdasarkan 3 output kegiatan yang dilaksanakan, realisasi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE yang tertinggi adalah pada output Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 93,08%, berturut-turut diikuti oleh output layanan perkantoran sebesar 90,74% dan layanan internal sebesar 50,85%. Rincian realisasi anggaran berdasarkan output adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Realisasi Berdasarkan Output Kegiatan

Kode	Output	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5.419.001	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	21.398.312.000	19.918.167.646	93,08
5.419.951	Layanan Internal (Overhead)	4.774.256.000	2.427.695.750	50,85
5.419.994	Layanan Perkantoran	53.484.461.000	48.531.121.873	90,74
	Jumlah	79.657.029.000	70.876.985.269	88,98

Sumber: Monev.anggaran.kemenkeu.go.id (31 Des 2018)

Capaian realisasi pada output nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE ditentukan oleh capaian realisasi **anggaran** pada 12 komponen kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan di masing-masing Bagian dan Subbagian lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Capaian realisasi anggaran pada masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Komponen kegiatan Nilai SAKIP Ditjen KSDAE

No	Komponen	Pagu	Realisasi	%
1	Penyusunan Program dan Anggaran	5.631.659.000	5.430.236.272	96,42%
2	Evaluasi dan Pelaporan	773.300.000	755.020.400	97,64%
3	Data dan Informasi	1.359.704.000	1.354.306.905	99,60%
4	Kerjasama dan Kemitraan	865.680.000	858.994.665	99,23%
5	Peraturan Perundang-undangan	2.251.059.000	1.856.356.635	82,47%
6	Pertimbangan dan Advokasi Hukum	1.102.575.000	947.578.030	85,94%
7	Administrasi Kepegawaian	1.447.905.000	1.369.455.376	94,58%
8	Administrasi jabatan fungsional	1.421.220.000	1.392.985.817	98,01%
9	Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana	1.085.875.000	1.049.858.413	96,68%
10	Administrasi Keuangan	1.332.860.000	1.132.300.364	84,95%
11	Ketatausahaan dan Umum	2.749.875.000	2.515.727.266	91,49%
12	Administrasi Perlengkapan	1.376.600.000	1.145.129.000	83,19%

Sumber: Monev.anggaran.kemenkeu.go.id (31 Des 2018)

Berdasarkan capaian realisasi anggaran masing-masing komponen di atas, masih terdapat anggaran yang tidak terealisasi pada beberapa komponen dikarenakan adanya kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Kendala dan permasalahan yang mempengaruhi capaian realisasi anggaran pada masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kendala dan Permasalahan komponen Nilai Sakip Ditjen KSDAE

No	Komponen	Kendala dan permasalahan
1	Penyusunan Program dan Anggaran	1. Sisa belanja barang persediaan (pencetakan rencana kerja Ditjen KSDAE 2019, petunjuk teknis penyusunan RKA, standar kegiatan dan biaya)
2	Evaluasi dan Pelaporan	1. Terdapat Sisa Belanja bahan pada beberapa kegiatan 2. Terdapat Beban jasa Profesi di kegiatan Fasilitasi Penilaian SAKIP Ditjen dan Setditjen KSDAE 3. Terdapat sisa belanja Perjalanan di beberapa kegiatan 4. Terdapat sisa belanja perjalanan Transpor dalam kota di kegiatan

No	Komponen	Kendala dan permasalahan
		Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang KSDAE 5. Sisa belanja Perjalanan lainnya di kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang KSDAE 6. Sisa belanja barang persediaan barang konsumsi di kegiatan Penyelenggaraan SPIP
3	Data dan Informasi	1. Terdapat sisa belanja bahan pada beberapa kegiatan 2. Terdapat sisa belanja perjalanan Biasa pada beberapa kegiatan 3. Terdapat sisa belanja perjalanan dinas paket meeting di kegiatan Pengelolaan dan Updating Aplikasi Pendataan SDAK KSDAE 4. Terdapat sisa Belanja Barang Persediaan konsumsi di kegiatan Penyusunan Buku statistik Ditjen dan penyajian Informasi pembangunan LHK 5. Terdapat sisa beban langganan daya dan jasa lainnya di kegiatan Pembangunan Infrastruktur ICT
4	Kerjasama dan Kemitraan	1. Terdapat sisa belanja bahan pada beberapa kegiatan 2. Terdapat Beban jasa profesi pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama 3. Terdapat belanja perjalanan biasa di beberapa kegiatan
5	Peraturan Perundang-undangan	1. Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan/keputusan menteri dan peraturan perundangan berupa biaya perjalanan dan paket meeting 2. Kegiatan sosialisasi peraturan perundangan bidang ksdae berupa biaya perjalanan lainnya
6	Pertimbangan dan Advokasi Hukum	1. Terdapat sisa belanja bahan dan non oprasional lainnya pada kegiatan penanganan perkara perdata dan TUN, asistensi penyelesaian kasus, fasilitasi dan koordinasi pertimbangan advokasi hukum dan sosialisasi dan pembinaan hukum perdata, TUN dan perizinan ksdae 2. Sisa biaya paket meeting
7	Administrasi Kepegawaian	1. Sisa biaya perjalanan pada kegiatan penataan SDM lingkup Ditjen KSDAE
8	Adminitrasi jabatan fungsional	1. Terdapat sisa belanja bahan di beberapa kegiatan yang belum terealisasi 2. Terdapat belanja Perjalanan biasa di beberapa kegiatan yang belum terealisasi 3. Terdapat belanja perjalanan dinas paket meeting di beberapa kegiatan yang belum terealisasi 4. Terdapat belanja modal lainnya di kegiatan Pembuatan sistem informasi, monitoring dan evaluasi jabatan fungsional yang belum terealisasi sebesar Rp.3.000.000
9	Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana	1. Terdapat sisa belanja bahan di beberapa kegiatan 2. Terdapat belanja perjalanan biasa pada beberapa kegiatan 3. Terdapat belanja perjalanan dinas paket meeting di beberaa kegiatan 4. Terdapat belanja honor output kegiatan di kegiatan rapat koordinasi kepegawaian, oerorganisasi dan tatalaksana lingkup Ditjen
10	Administrasi Keuangan	1. Terdapat sisa belanja bahan di beberapa kegiatan yang belum terlaksana. 2. Terdapat belanja honor output kegiatan yang belum di bayarkan di beberapa kegiatan 3. Terdapat belanja perjalanan dinas paket meeting 4. Terdapat belanja perjalanan lainnya di beberapa kegiatan yang belum terlaksana 5. Terdapat belanja perjalanan transport dalam kota di kegiatan Penyusunan Laporan keuangan lingkup Ditjen KSDAE sem 1 dan Monitoring dan Evaluasi penataan hibah ditjen ksdae
11	Ketatausahaan dan Umum	1. Terdapat sisa belanja modal pada kegiatan penatausahaan surat dan arsip 2. Terdapat sisa biaya perjalanan dinas LN

No	Komponen	Kendala dan permasalahan
12	Administrasi Perlengkapan	1. Terdapat sisa belanja jasa profesi dan paket meeting pada kegiatan penyusunan laporan BMN 2. Terdapat sisa belanja bahan pada beberapa kegiatan

Pada output layanan perkantoran, terdiri dari 2 komponen, yaitu gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan perkantoran. Beberapa kendala yang mempengaruhi capaian realisasi anggaran pada output ini yaitu terdapat sisa belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan khusus/tunjin, uang makan, tunjangan PPh, tunjangan Struktural, sisa belanja keperluan sehari-hari perkantoran, sisa langganan daya dan jasa meliputi surat dinas, listrik telepon, beban sewa dan langganan daya dan jasa lainnya, sisa biaya pemeliharaan peralatan dan mesin

Pada output layanan internal (overhead) realisasi masih tergolong rendah sebesar 50,85%, hal ini salah satu menjadi faktor rendahnya realisasi Setditjen KSDAE dengan kendala yaitu Kegiatan pengadaan kendaraan revisi Lore Lindu tidak dilaksanakan senilai 2.316.190.000. Pada tahun anggaran 2018, untuk menjamin kinerja yang optimal dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana pengolahan data dan komunikasi yang menunjang aktifitas administrasi umum sebuah instansi, Sekretariat Ditjen KSDAE melaksanakan kegiatan pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi sebanyak 48 unit. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana kelengkapan gedung perkantoran yang memadai dan layak serta untuk alokasi penggantian barang inventaris yang lama, Sekretariat Ditjen KSDAE mengadakan peralatan dan fasilitas perkantoran berupa sarpras perpustakaan di Bogor, sarpras ruang Sekretaris Ditjen KSDAE di Bogor, sarpras opsroom Ditjen KSDAE di Jakarta, sarpras ruang Bagian Program dan Evaluasi di Jakarta, sarpras ruang rapat Ditjen KSDAE di Bogor, dan sarpras ruang Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana di Bogor. Dalam pelaksanaannya, output ini telah dapat dilaksanakan dengan cukup baik, dari target 5 unit telah terealisasi 5 unit atau tercapai 100%.

Berdasarkan capaian kinerja kegiatan dan realisasi anggaran tersebut, kemudian dilakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan persentase capaian kinerja dengan realisasi anggaran. Dari hasil capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE sebesar 100,36 % dan realisasi anggaran sebesar 88,98%, diperoleh rasio efisiensi sebesar 1,13. Angka tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE efisien terhadap capaian kinerja.

B. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional dan Proyek SBSN

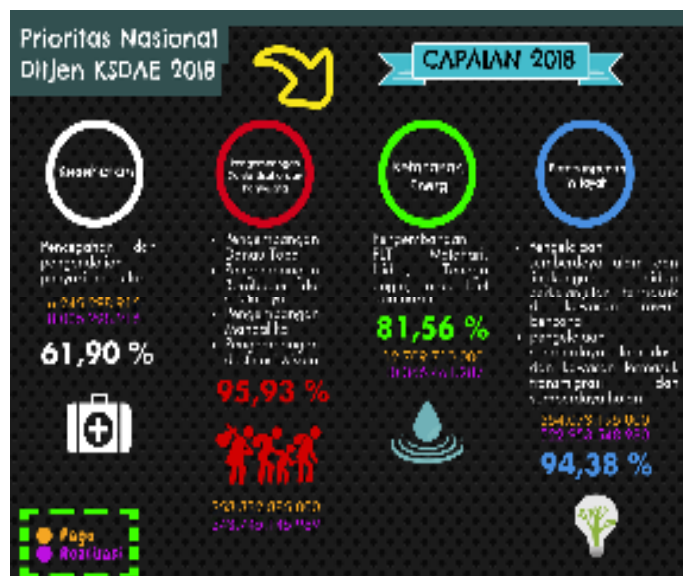
Sesuai dengan Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE turut berperan dalam pelaksanaan 4 program prioritas nasional (PN) khususnya dalam penyusunan rencana kegiatan dan pengalokasian anggaran satuan kerja yang menjadi lokus prioritas pelaksanaan pencapaian program.

Capaian 4 program prioritas yang diampuh oleh Ditjen KSDAE tahun 2018 sebagaimana dalam tabel berikut ini dan lengkapnya dalam lampiran 3.

Tabel 6. Target prioritas Nasional Ditjen KSDAE Tahun 2018

No	Program Prioritas	Kategori Prioritas	Program Prioritas Nasional	Target	Capaian
1	Kelestarian Energi	Kelestarian Energi	Kelestarian Energi	100.000	100.000
2	Pengembangan Daya Listrik dan Ketersediaan	Pengembangan Daya Listrik dan Ketersediaan	Pengembangan Daya Listrik dan Ketersediaan	100.000	100.000
3	Kelestarian Energi	Kelestarian Energi	Kelestarian Energi	100.000	100.000
4	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	Pengembangan Wilayah	100.000	100.000
TOTAL				341.440	341.440

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN, HIDUP DAN KELUHAN



Gambar 11. Capaian Prioritas Nasional Ditjen KSDAE Tahun 2018



Gambar 12. Program Prioritas Nasional
Khusus program prioritas pembangunan pariwisata tidak hanya menggunakan mekanisme pendanaan APBN tetapi juga menggunakan mekanisme SBSN.



Gambar 13. infografis proyek SBSN

C. Capaian Aksi Tematik

Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal KSDAE mendapatkan mandat untuk turut berperan dalam mensukseskan kegiatan aksi tematik yaitu tema Perhutanan Sosial, Pariwisata, dan Kebijakan Kelautan Indonesia. Aksi tematik tersebut menjadi pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) yang secara langsung melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian kegiatan prioritas tersebut. Dalam rangka pemantauan capaian rencana aksi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE melakukan pemantauan capaian aksi tematik tersebut.

Tema : Perhutanan Sosial

Ukuran Keberhasilan : Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi sebanyak 117 kelompok.

Capaian : Terlaksananya pengelolaan kolaboratif bersama masyarakat dalam pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) atau jasa lingkungan pada 161 kelompok di 150 desa di bawah binaan 26 UPT KSDA.

Tema : Pariwisata

Ukuran Keberhasilan : Pemasangan Mouring Buoy di kawasan TN Komodo

Capaian : Pengadaan mouring buoy tidak dapat dilaksanakan karena penyedia tidak dapat menyanggupi ketersediaan barang karena naiknya harga diakibatkan naiknya kurs euro, selanjutnya dilakukan pelelangan ulang namun karena keterbatasan waktu tidak dapat dilaksanakan

Tema : Kebijakan Kelautan Indonesia

1. Ukuran Keberhasilan : Jumlah unit kawasan konservasi non TN yang siap dikunjungi dengan sarpras yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas.

Capaian : Sarana prasarana wisata alam telah selesai dibangun di 17 KK pesisir dan laut (BBKSDA Sumatera Utara 5 kawasan konservasi, BKSDA Aceh 2 kawasan konservasi, dan BKSDA Nusa Tenggara Barat 10 kawasan konservasi)

2. Ukuran Keberhasilan : Jumlah unit kawasan TN yang siap dikunjungi dengan sarpras yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas.

Capaian : Sarana prasarana wisata alam telah selesai dibangun di 5 TN pesisir dan laut (TN Bali Barat, TN Kepulauan Seribu, TN Komodo, TN Takabonerate, dan TN Wakatobi).

3. Ukuran keberhasilan : Penataan pengelolaan kawasan ekosistem esensial

Capaian : Pengusulan kawasan ekosistem esensial mangrove di Kabupaten Cirebon, pengembangan kawasan ekosistem esensial mangrove di Kabupaten Pematang, dan sosialisasi penataan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Lombok Barat.

4. Ukuran keberhasilan : Jumlah KPHK pada kawasan konservasi 99 laut dan pesisir yang terbentuk dan beroperasi
Capaian : Telah beroperasinya 30 KPHK pada kawasan konservasi laut dan pesisir
5. Ukuran keberhasilan : Jumlah kawasan konservasi di pesisir dan laut yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai METT minimal 70%
Capaian : Telah dilakukan penilaian METT pada 213 kawasan konservasi.
6. Ukuran keberhasilan : Peningkatan populasi penyu sisik, penyu belimbing dan keanekaragaman jenis ikan di wilayah laut dan pesisir
Capaian : Telah dilaksanakan kegiatan peningkatan populasi satwa prioritas penyu hijau dan penyu sisik pada 7 Taman Nasional (BBTN Teluk Cenderawasih, TN Taka Bonerate, TN Kepulauan Seribu, TN Karimunjawa, TN Meru Betiri, TN Bunaken, dan TN Wakatobi).

BAB IV

PENUTUP

Capaian nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2018 sebesar 78,03 poin dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,36%. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 95,13 %, maka tingkat capaian kinerja termasuk dalam kriteria BB (Sangat Baik)

Pencapaian nilai SAKIP tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE semakin baik dan dapat tercapai lebih awal dari target jangka menengahnya sebesar 78,00 poin pada tahun 2019. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan, diantaranya:

1. Pemantauan pencapaian target kegiatan sesuai rencana aksi belum dilakukan secara periodik
2. Pencapaian target masih diukur dilevel output belum sampai pada capaian outcome

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal KSDAE akan dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa mendatang dengan melakukan beberapa perbaikan, diantaranya:

1. Melakukan Pemantauan capaian renaksi minimal tiap triwulan atau tiap semester
2. Melakukan pengukuran target sampai ke capaian outcome bukan hanya di output saja

Pada tahun 2019, kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE diarahkan untuk mendukung strategi pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi mandat Direktorat Jenderal KSDAE yang meliputi pengelolaan kawasan konservasi bersama masyarakat dalam kegiatan pemolaan dan penataan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, pembentukan dan pelaksanaan fungsi kelembagaan ekosistem esensial serta pengelolaan daerah penyangga, pengembangan ekowisata prioritas, peningkatan populasi satwa prioritas, perlindungan dan pengamanan kawasan, pemulihan ekosistem dan pemanfaatan jasa lingkungan energi air untuk mikrohidro.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Komponen dan rincian kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2018

No.	Komponen	Rencana kegiatan Tahun 2018
BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI		
1.	Program dan Anggaran	a. Penyusunan Rencana Kerja Ditjen KSDAE Tahun 2019 b. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2019 c. Kelompok Kerja Program dan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2018 d. Penyusunan Juknis Penyusunan RKA Bidang KSDAE Tahun 2019 e. Penyusunan SKB Bidang KSDAE Tahun 2019 f. Penyusunan Perjanjian Kinerja Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2018 g. Penyusunan Anggaran Bidang KSDAE Tahun 2019 h. Pra Rakornis Lingkup Bidang KSDAE Tahun 2018 i. Rapat Koordinasi Teknis Bidang KSDAE Tahun 2018 j. Pemantapan Penyusunan RKA KL Bidang KSDAE Tahun 2018 k. Koordinasi dan konsultasi Program dan Anggaran l. Bimbingan teknis Program dan Anggaran m. Revisi Renstra n. Penelaahan revisi anggaran Tahun 2018
2.	Evaluasi dan Pelaporan	a. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen KSDAE dan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 b. Penyusunan Laporan Capaian Renja Ditjen KSDAE dan Laporan Capaian Renja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 c. Penilaian SAKIP Ditjen dan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE d. Monev Capaian Indikator Kinerja dan DIPA Satker Pusat e. Rakor Evaluasi Kinerja dan Sosialisasi Evaluasi SAKIP Ditjen KSDAE f. Penyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan Anggaran Bidang KSDAE g. Evaluasi Dokumen Laporan Kinerja UPT dan Asistensi Penyusunan Laporan h. Koordinasi dan konsultasi bidang evaluasi dan pelaporan i. Bimbingan teknis bidang evaluasi dan pelaporan j. Reviu Renstra k. SPIP
3.	Data dan Informasi	a. Penyusunan Buku Statistik Ditjen KSDAE Tahun 2017 b. Penyusunan Buku Statistik Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 c. Rekonsiliasi Pendataan Bidang KSDAE Tahun 2018 d. Pengelolaan dan Updating Aplikasi Pendataan SIDAK KSDAE e. Pengelolaan dan Updating Website f. Penyajian Informasi Pembangunan LHK g. Talkshow/Teleconference pembangunan KSDAE h. Koordinasi Penyelesaian permasalahan Strategis Bidang KSDAE

		i. Pembangunan ICT untuk pemantauan, pengelolaan kawasan konservasi j. Media trip untuk ekspose pengelolaan kawasan konservasi k. Koordinasi dan konsultasi bidang data dan informasi l. Bimbingan teknis bidang data dan informasi
BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA		
1.	Administrasi Kepegawaian	a. Updating Data SIMPEG dan SAPK b. Penyusunan Laporan Kepegawaian (statistik, DUK, Semester) c. Pelantikan/serah Terima Jabatan Pejabat Struktural d. Penyusunan Formasi/Analisis Kebutuhan Pegawai e. Penyusunan Peta Jabatan Pegawai f. Pemberkasan Kenaikan Pangkat Reguler (2 periode) g. Penataan Pejabat Struktural dan Non Struktural Lingkup KSDAE h. Koordinasi dan Konsultasi Kepegawaian i. Bimbingan teknis bidang Kepegawaian j. Pemberian Penghargaan dan penyelesaian kasus kepegawaian k. Rapat rutin penyelesaian kepegawaian l. Penyusunan Data/Monev LHKPN dan ASN lingkup Ditjen KSDAE m. Penataan arsip kepegawaian
2.	Administrasi Jabatan Fungsional	a. Penilaian DUPAK b. Monitoring Jabatan Fungsional lingkup Ditjen KSDAE c. Pembinaan Jabatan Fungsional lingkup Ditjen KSDAE d. Pemberkasan Kenaikan Pangkat Fungsional e. Monitoring dan evaluasi tugas belajar dan ijin belajar f. Penyusunan Rencana Pelatihan dan Diklat SDM g. Sertifikasi Kegiatan Penunjang Pengembangan Fungsional h. Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetisi Jabatan Fungsional i. Koordinasi dan konsultasi bidang jabatan fungsional j. Bimbingan teknis bidang jabatan fungsional k. Pembinaan Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE l. Pembinaan Pegawai lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
3.	Pengembangan Organisasi dan Ketatalaksanaan	a. Penyusunan Analisis Jabatan b. Penataan Organisasi dan Evaluasi Kinerja Organisasi lingkup Ditjen KSDAE c. Penyusunan dan Pencetakan pedoman bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana lingkup Ditjen KSDAE d. Penyusunan pedoman SOP lingkup Ditjen KSDAE e. Penyusunan standar sarana dan prasarana f. Workshop pengembangan organisasi lingkup Ditjen KSDAE g. Koordinasi dan konsultasi bidang organisasi ketatalaksanaan h. Bimbingan teknis bidang organisasi ketatalaksanaan'

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM		
1.	Administrasi Keuangan	a. Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen dan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2017 b. Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen KSDAE semester I Tahun 2018 c. Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE semester I Tahun 2018 d. Laporan SAK UAKPA Triwulan I dan Triwulan III Tahun 2018 e. Pembinaan Pengelolaan PNBPN bidang KSDAE dan pengembangan E-PNBPN bidang KSDAE f. Penyegaran Bendahara Pengeluaran lingkup Ditjen KSDAE g. Pembinaan Keuangan bagian Pelaksana Anggaran Satker h. Pendampingan audit dan monitoring tindak lanjut LHA/BPK RI/BPKP dan Itjen i. Verifikasi keuangan j. Administrasi Pengelolaan DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE k. Monitoring tindak lanjut kerugian Negara l. Upgrade database LHA Ditjen PHKA m. Koordinasi dan Bimbingan Teknis Bidang Keuangan n. Pengelolaan gaji karyawan satker pusat lingkup Ditjen KSDAE
2.	Ketatausahaan dan Umum	a. Pengelolaan dan Asistensi Kearsipan lingkup Ditjen dan Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE b. Sosialisasi Tata Persuratan Kementerian LHK c. Layanan dan Operasional Rumah Tangga Pimpinan d. Pengelolaan surat/dokumen Dinas
3.	Administrasi Perlengkapan	a. Penyusunan laporan BMN Ditjen dan Seditjen KSDAE tahun 2017 b. Penyusunan laporan BMN Ditjen dan Sekretariat Direktorat Jenderal Semester I Tahun 2018 c. Koordinasi dan konsultasi bidang ketatausahaan umum d. Bimbingan Teknis Penatausahaan Persediaan dan Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN e. Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara f. Kelompok Kerja Penanganan Kasus-kasus dan Penyelesaian Permasalahan BMN g. Monitoring dan Evaluasi Hibah BMN h. Penyelenggaraan Penghapusan/ Pemindahtanganan BMN Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE i. Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Perpustakaan lingkup Ditjen KSDAE j. Pengadaan Obat-obatan dan bahan Poliklinik Ditjen KSDAE k. Operasional ULP Unit Pusat Ditjen KSDAE l. Penyegaran Satuan Pengamanan (Satpam) lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE

		m. Renovasi museum pusat konservasi
BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK		
1.	Kerjasama dan Kemitraan	a. Penelaahan Proposal dan Perjanjian Kerjasama b. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kerjasama c. Koordinasi dan konsultasi kerjasama/kemitraan d. Bimbingan teknis bidang kerjasama/kemitraan e. Kelompok Kerja Mitra Kerjasama f. Fasilitasi kerjasama/kemitraan dengan instansi terkait g. Penyusunan data base kerjasama
2.	Peraturan Perundang-undangan	a. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan b. Perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1990 c. Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Bidang KSDAE d. Koordinasi dan konsultasi bidang perundang-undangan e. Bimbingan teknis bidang perundang-undangan
3.	Pertimbangan dan Advokasi Hukum	a. Penanganan Perkara Perdata dan Perkara TUN b. Asistensi Penyelesaian Kasus-kasus bidang KSDAE c. Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Advokasi Hukum d. Monitoring dan Evaluasi SIMAKSI/Perizinan Bidang KSDAE e. Pencetakan bahan sosialisasi perijinan bidang KSDAE f. Sosialisasi dan pembinaan hukum pemanfaatan TSL, Jasa Lingkungan dan Pariwisata Alam g. Koordinasi dan konsultasi bidang pertimbangan dan advokasi hukum h. Bimbingan teknis bidang pertimbangan dan advokasi hukum

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE 2018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Herry Subagiadi, M.Sc

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc

Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2018

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal KSDAE,



Ir. WIRATNO, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Pihak Pertama,
Sekretaris Ditjen KSDAE,



Ir. HERRY SUBAGIADI, M.Sc
NIP. 19611115 198703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM DAN EKOSISTEM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00	77,75

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

Anggaran

Rp. 77.970.119.000,-

Direktur Jenderal KSDAE,



Ir. WIRATNO, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003

Jakarta, 15 Januari 2018
Sekretaris Umum KSDAE,



Ir. HERRY SABAGIADI, M.Sc
NIP. 19621116 198703 1 001

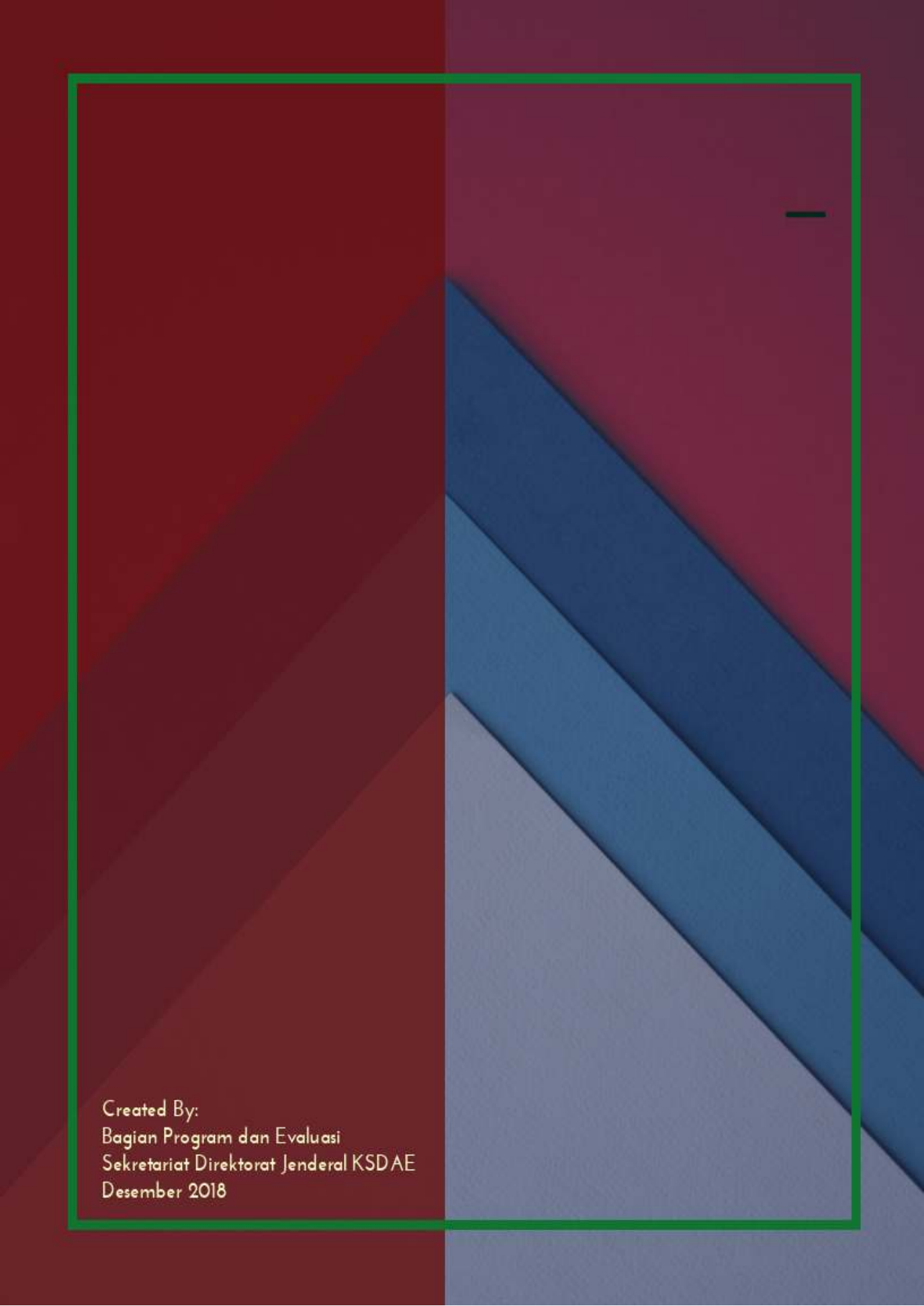
Lampiran 3. Pagu dan Realisasi Kegiatan Prioritas Nasional Ditjen KSDAE Tahun 2018

Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Output/Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran	Serapan Anggaran	Target Output (satuan)	Realiasi Output
Kesehatan	08. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	5426. Pengelolaan Taman Nasional	033. Intervensi metode agroengineering di daerah buffer TN Lore Lindu	3,450,050,000	1,953,277,960	56.62 %	1 Ha	0 Ha
			034. Restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu	5,483,000,000	2,291,570,774	41.79 %	300 Ha	5 Ha
			035. Pengamanan Kawasan TN Lore Lindu	4,000,000,000	3,760,450,182	94.01 %	217991 Ha	66105,29 Ha
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata	08. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	5425. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	027. Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Kawasan Konservasi	97,615,614,000	93,058,891,686	95.33 %	22 UPT KSDA	22 UPT KSDA
			037. Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di Kawasan Danau Toba dan sekitarnya	26,973,530,000	25,933,125,805	96.14 %	7 unit TWA	7 unit TWA
			038. Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di Kawasan Borobudur dan sekitarnya	13,599,008,000	13,382,840,139	98.41 %	4 unit TWA	4 unit TWA
			039. Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di Kawasan Mandalika dan sekitarnya	25,161,500,000	23,432,197,349	93.13 %	7 unit TWA	7 unit TWA
		5426. Pengelolaan Taman Nasional	021. Sarana dan Prasarana Ekowisata pada Taman Nasional	147,579,664,000	141,977,401,511	96.2 %	38 unit TN	38 unit TN
			029. Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di Kawasan Danau Toba dan sekitarnya	10,643,164,000	10,576,476,848	99.37 %	2 unit TN	2 unit TN
			030. Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di Kawasan Borobudur dan sekitarnya	13,579,955,000	13,160,640,497	96.91 %	2 unit TN	2 unit TN
			031. Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di Kawasan Mandalika dan sekitarnya	23,180,450,000	22,223,572,134	95.87 %	3 unit TN	3 unit TN
Ketahanan Energi	08. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	5425. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	029. Energi listrik yang dihasilkan dari Mini/Mikro Hidro di Kawasan Konservasi	5,100,000,000	4,992,011,297	97.88 %	70 Kwatt	210 Kwatt
		5426. Pengelolaan Taman Nasional	022. Energi listrik yang dihasilkan dari mini/mikro hidro di taman nasional	7,609,710,000	5,374,449,990	70.63 %	9145 Kwatt	10090 Kwatt

Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Output/Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran	Serapan Anggaran	Target Output (satuan)	Realiasi Output
Pembangunan wilayah	08. Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	5421. Pengelolaan Kawasan Konservasi	008. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan di kawasan konservasi	17,200,000,000	17,195,235,794	99.97 %	26 unit KSDA	26 unit KSDA
			009. Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional	36,911,478,000	36,868,073,209	99.88 %	48 unit TN	48 unit TN
		5422. Konservasi Spesies dan Genetik	012. Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi non taman nasional (Sarana prasarana Wildlife Rescue Unit (WRU))	21,050,000,000	20,892,233,173	99.25 %	10 unit	55 unit
			013. Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi taman nasional (Sarana prasarana Wildlife Rescue Unit (WRU))	4,206,000,000	3,926,123,255	93.35 %	2 unit	9 unit
		5425. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	001. Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat	18,681,303,000	17,296,254,031	92.59 %	122 unit	127 unit
			007. Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi	10,100,173,000	9,065,742,520	89.76 %	112 unit	111 unit
			010. Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi Kawasan Konservasi	17,580,885,000	16,361,013,066	93.06 %	75040 Ha	46137,36 Ha
			011. Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan konservasi dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat	34,576,183,000	32,658,602,111	94.45 %	123 kejadian	114 kejadian
			013. Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat	18,721,556,000	17,116,390,006	91.43 %	9379 Ha	8904,24 Ha
			022. Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat	27,273,238,000	25,407,197,784	93.16 %	2%	32,04%

Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Output/Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran	Serapan Anggaran	Target Output (satuan)	Realiasi Output
			040. Jumlah Wildlife Rescue Unit yang terbentuk dan beroperasi bersama masyarakat dalam rangka pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat	8,158,714,000	7,745,852,468	94.94 %	23 unit	12 unit
			041. Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi Kawasan Konservasi	31,389,739,000	28,663,998,014	91.32 %	117 kelompok	106 kelompok
		5426. Pengelolaan Taman Nasional	001. Rencana Penataan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi berbasis Masyarakat	21,991,241,000	20,043,096,575	91.14 %	54 unit	54 unit
			006. Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi di Taman Nasional	20,242,607,000	19,045,422,551	94.09 %	145 unit	139 unit
			007. Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi taman nasional	39,008,934,000	35,624,963,898	91.33 %	25385,92 Ha	32290,61 Ha
			008. Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi taman nasional	57,537,332,000	53,957,723,258	93.78 %	248 kelompok	300 kelompok
			009. Jumlah gangguan yang berhasil diturunkan pada kawasan Taman Nasional dengan pengelolaan kolaboratif berbasis masyarakat	71,273,829,000	68,398,363,003	95.97 %	145 kejadian	122 kejadian
			011. Pemulihan Kawasan Konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat	50,863,685,000	47,138,426,006	92.68 %	30706,42 Ha	23678,05 Ha
			016. Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah secara kolaboratif dengan masyarakat	46,146,298,000	44,433,429,528	96.29 %	2%	32,04%

Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Output/Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi anggaran	Serapan Anggaran	Target Output (satuan)	Realiasi Output
			032. Jumlah Wildlife Rescue Unit yang terbentuk dan beroperasi bersama masyarakat dalam rangka pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat	1,160,000,000	1,115,408,730	96.16 %	2 unit	2 unit



Created By:
Bagian Program dan Evaluasi
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
Desember 2018